



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 70 TAHUN 1996

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG SELATAN NOMOR 13 TAHUN 1996 TENTANG PENERIMAAN
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan tanggal 31 Juli 1996 Nomor 188/0910/28.N/1996 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 1996 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan peraturan Daerah Perubahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 13 TAHUN 1996 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH,**

Dengan Perubahan sebagai berikut :

- A. Konsideran Menimbang, Alinian pertama kata "guna" diubah dan harus dibaca "dan untuk".
- B. Konsideran Mengingat nomor urut 2 menjadi nomor urut 1, nomor urut 1 menjadi nomor urut 2, nomor urut 9 dihapus, nomor urut 10 menjadi nomor urut 9.
- C. Bab II pasal 2 ayat 1 setelah kata pihak ketiga ditambah kata "yang", pasal 2 ayat 2 setelah kata lain-lain ditambah kata "bentuk".
- D. Bab III pasal 4 ayat 2 kalimat "atau Peraturan Daerah" dihapuskan.
- E. Bab IV pasal 6 ayat 3 diantara kata daftar dan inventaris ditambah dengan kata "barang".
- F. Bab V Ketentuan lain-lain, diubah dan harus dibaca "Ketentuan Peralihan".
- G. Bab VI pasal 8 ayat 1 sesudah kata "sepanjang" ditambah dengan kata "mengenai tehnis", kata "surat" dihapus, ayat 2 kata "sejak" diubah dan harus dibaca "pada".
- H. Dalam penjelasan I. kata "penjelasan" dihapuskan, dalam penjelasan II. kata "penjelasan" dihapuskan.

Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 3 - 10 - 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN :

- 1. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD di Jakarta ;
- 2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan di Kalianda ;
- 3. Ketua DPRD Tingkat II Lampung Selatan di Kalianda ;
- 4. Himpunan Keputusan.